

## DAFTAR REFERENSI

- Ahira, A. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arfani, M. 2019. *DKI Genjot PAD, di Jakarta Pusat Retribusi IMB malah Bermasalah*. Diakses tanggal 25 Agustus 2020. <https://pontas.id/2019/11/07/dki-genjot-pad-di-jakarta-pusat-retribusi-imb-malah-bermasalah/>
- Caro, P.D. 2017. The Contribution Of Tax Statistics For Analysing Regional Income Disparities In Italy. *Journal of Income Distribution*, 26 (1), 1-27.
- Databoks. 2018. *Berapa Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?*. diakses tanggal 16 Desember 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/berapa-pendapatan-asli-daerah-dki-jakarta>
- Elburz Z, Kemal M.C, and Peter N. 2018. The Mutual Relationship Between Regional Income And Deforestation: A Study On Turkey. *Journal Of The Faculty of Architectur*, 2, vol.35, 77-87.
- Ersita, M and I.Elim. 2016 . Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol 4, No 1 , 889-897.
- Farid, M., A. M. 2018. Fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial. Penerbit: Prenadamedia Group. Edisi pertama.
- Hengyun Li. et al. 2016. Tourism and regional income inequality: Evidence from China. *Annalasis of Tourism Research*, 58, 81-99..
- Mentayani, Ida, et al. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 7 No. 1
- Nugraha, P.L. 2018. *Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota*

- Bandung (Periode 2013-2017)*. Tugas akhir, Fakultas Ekonomi/Akuntansi Universitas Kristen Maranatha
- Puspitasari, E.R.A. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Kabupaten Blora Tahun 2009- 2013*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Putra, W. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT> Raja Grafindo Persada
- Putri, I.M. 2016. *Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta Tahun 2009-2014*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ravianto, J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta : Bumi Aksara
- Sartika, D. 2019. *Analisis Efektifitas Pendapatan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sudaryo, Y., Sjarif,D., and Sofiati, N. A. 2017. *Keungan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Usman, R. 2017. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015). *Journal Of Accounting And Finance*,1,1,1-17.
- Undang            Undang            Nomor            23            tahun            2014.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>  
 (diakses tanggal 21 Agustus 2020 sebagai referensi)
- Undang            Undang            Nomor            25            Tahun            2004            .  
<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/26.pdf> (diakses tanggal 21 Agustus 2020 sebagai referensi)

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.  
Hukumonline.com<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/>  
(diakses tanggal 2  
November 2019 sebagai referensi Undang-undang).
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004.  
Hukumonline.com<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/>  
(diakses tanggal 2 November 2019  
sebagai referensi Undang-undang).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.  
Hukumonline.com<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/>  
(diakses tanggal 2 November 2019  
sebagai referensi Undang-undang).

Warsito. 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Semesta Media

Yuliasti, N.A.I. and N. L. P. S. Dewi, 2017. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR. *Jurnal Riset Akuntansi*,7(1), 1-12.

## LAMPIRAN

1. Bagaimanakah cara penentuan dan penetapan target retribusi di DKI Jakarta ?
2. Bagaimanakah realisasi penerimaan retribusi terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah melampaui target? Bila tidak, apakah kendalanya?
3. Adakah kesulitan/kendala selain dana yang dihadapi dalam pemungutan retribusi daerah/realisasi target retribusi daerah ? Dapatkah dijelaskan ?
- 4.. Jika kendala dalam bentuk dana, berapa kira-kira dana yang dibutuhkan agar penerimaan retribusi dapat terealisasi sesuai target atau bahkan melampaui?
5. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah?
6. Apakah peningkatan penerimaan retribusi daerah otomatis meningkatkan juga pendapatan daerah itu sendiri? Jika iya, mengapa? jika tidak, mengapa?
7. Seberapa penting efektifitas penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah?
8. Seberapa penting efisiensi penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah?
9. Seberapa penting kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah?
10. Menurut bapak/ibu apa yg menjadi syarat untuk memenuhi Penerimaan retribusi daerah sudah bisa dikatakan efektif, efisien dan sudah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah?

Jawaban:

1. Dalam pemungutan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Bapenda berfungsi sebagai kordinator. Usulan target dikumpulkan dari masing-masing SKPD Pemungut Retribusi yang lebih paham dengan karakteristik masing-masing jenis retribusi (di tahun ini ada 117 pungutan retribusi), lalu diolah oleh Bapenda dengan melihat beberapa indikator, antara lain melihat perbandingan realisasi retribusi di tahun-tahun sebelumnya, melihat kebijakan yang sedang berjalan atau akan berlaku di tahun depan yang akan mempengaruhi realisasi retribusi, permasalahan yang ada di masing-masing pungutan retribusi dan lain sebagainya.

Kemudian usulan target dibuat dan dibahas oleh Tim Tapd, Yang terdiri dari Sekda, Asisten, Bappeda, Bapenda dan BPKD dan instansi terkait lainnya.

2.

### Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

#### SKPD Pemungut Retribusi Per 31 Desember 2019

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Retribusi Jasa Umum	114,097,000,000	132,527,067,232	116.15
2	Retribusi Jasa Usaha	174,284,000,000	178,172,378,820	102.23
3	Retribusi Perizinan Tertentu	421,750,000,000	276,836,124,580	65.64
<b>Total</b>		<b>710,131,000,000</b>	<b>587,535,570,632</b>	<b>82.74</b>

Pada tahun 2019, realisasi retribusi jenis perizinan tertentu tidak mencapai target dikarenakan kurangnya minat masyarakat yang membuat Ijin

Sedangkan di tahun 2020 , dikarenakan ada bencana Covid-19 menyebabkan berkurangnya realisasi retribusi, juga adanya kebijakan relaksasi retribusi dari Pemprov DKI Jakarta

3. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya pungutan retribusi daerah, yang memiliki karakteristik masing-masing ,sehingga sulit untuk membuat kebijakan yang seragam. Banyaknya SKPD Pemungut yang mengelola Retribusi (ada 17 SKPD) , berbeda dengan Pajak yang hanya dikeola oleh 1 instansi (Bapenda) dimana di pengelolaan pajak, secara administrasi lebih cepat dan jika ada kebijakan baru lebih cepat koordinasinya, karena masih dalam 1 instansi.

4. Dibutuhkan dana yang cukup besar terutama untuk pengembangan system e-retribusi yang saat ini masih kurang memenuhi keperluan pengolahan data retribusi
5. Mempermudah pembayaran e-retribusi, yang semula hanya melalui teller bank DKI, sekarang Retribusi sudah dapat dibayar melalui Jakone, Tokopedia dan Gopay. Juga sedang dikembangkan pembayaran melalui QRIS  
Telah dibuatnya system retribusi , bernama e-retribusi, yang semula masih manual
6. Tentu, karena pendapatan retribusi termasuk dalam PAD
7. Pemungutan retribusi yang efektif turut memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
8. Jika efisiensi yang dimaksud di sini adalah penekanan biaya yang digunakan untuk pemungutan. Seperti yang terjadi saat ini, dimana banyak anggaran yg di cut, termasuk dalam pengembangan system pengelolaan retribusi, sehingga membuat terhambatnya pengelolaan data secara cepat, akurat dan efisien.
9. Jika dibandingkan dengan kontribusi penerimaan Pajak daerah , kontribusi retribusi hanya sekitar 1,44% saja di tahun 2019 di DKI Jakarta. Dikarenakan rendahnya tarif retribusi dan mretribusi merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
10. Dalam hal realisasi retribusi atas target retribusi yang sudah ditetapkan.

Retno Utari, S.Kom

Pengolah Data Retribusi

Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain PAD

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

1. Bagaimanakah cara penentuan dan penetapan target retribusi di DKI Jakarta ?

Jawaban :

Usulan target dikumpulkan dari masing-masing SKPD Pemungut Retribusi, lalu diolah oleh Bapenda dengan melihat beberapa variabel, seperti perbandingan realisasi retribusi di tahun-tahun sebelumnya, kebijakan yang sedang berjalan yang akan mempengaruhi realisasi retribusi, dan permasalahan yang ada di masing-masing pungutan retribusi. Kemudian usulan target dibuat dan dibahas oleh Tim TAPD, Yang terdiri dari Sekda, Asisten, Bappeda, Bapenda dan BPKD dan instansi terkait lainnya. Dalam hal pemungutan Retribusi Daerah, Bapenda DKI Jakarta berfungsi sebagai kordinator.

2. Bagaimanakah realisasi penerimaan retribusi terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah melampaui target? Bila tidak, apakah kendalanya?

Jawaban :

#### **Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah**

##### **SKPD Pemungut Retribusi Per 31 Desember 2019**

<b>NO</b>	<b>JENIS PENDAPATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	Retribusi Jasa Umum	114,097,000,000	132,527,067,232	116.15
2	Retribusi Jasa Usaha	174,284,000,000	178,172,378,820	102.23
3	Retribusi Perizinan Tertentu	421,750,000,000	276,836,124,580	65.64
<b>Total</b>		<b>710,131,000,000</b>	<b>587,535,570,632</b>	<b>82.74</b>

Pada tahun 2019, realisasi retribusi jenis perizinan tertentu tidak mencapai target dikarenakan kurangnya minat masyarakat yang membuat perizinan dan juga mungkin ada masyarakat yang dengan sengaja tidak membayarkannya. Sedangkan di tahun 2020, dikarenakan ada bencana Covid-19 menyebabkan berkurangnya realisasi retribusi, juga adanya kebijakan relaksasi retribusi dari Pemprov DKI Jakarta

Sumber Data : Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-lain PAD

3. Adakah kesulitan/kendala selain dana yang dihadapi dalam pemungutan retribusi daerah/realisasi target retribusi daerah ? Dapatkah dijelaskan ?

Jawaban :

- Kendala yang dihadapi adalah banyaknya pungutan retribusi daerah yang memiliki karakteristik tertentu.
- Banyaknya SKPD Pemungut yang mengelola Retribusi ada 17 SKPD

4. Jika kendala dalam bentuk dana, berapa kira-kira dana yang dibutuhkan agar penerimaan retribusi dapat terealisasi sesuai target atau bahkan melampaui?

Jawaban :

Dana yang diperlukan tentunya melihat dari jumlah retribusi yang akan dipungut. Dalam kondisi ideal, dana pemungutan harus lebih kecil daripada jumlah penerimaan retribusi yang masuk.

5. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah?

Jawaban :

- Mempermudah pembayaran retribusi, yang semula hanya melalui teller bank DKI, sekarang Retribusi sudah dapat dibayar melalui Jakone, Tokopedia dan Gopay.
- Pembayaran melalui QRIS.
- Dibuatnya sistem retribusi yang bernama e-retribusi.

6. Apakah peningkatan penerimaan retribusi daerah otomatis meningkatkan juga pendapatan daerah itu sendiri? Jika iya, mengapa? jika tidak, mengapa?

Jawaban :

Iya, pendapatan retribusi termasuk dalam PAD

7. Seberapa penting efektifitas penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah?

Jawaban :

Pemungutan retribusi daerah yang efektif turut memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.



8. Seberapa penting efisiensi penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah?

Jawaban :

Pemungutan retribusi daerah yang efektif memberikan efisiensi penerimaan retribusi daerah.

9. Seberapa penting kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah?

Jawaban :

Di tahun 2019, penerimaan dari retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan asli daerah sekitar 1,44%.

10. Menurut bapak/ibu apa yg menjadi syarat untuk memenuhi Penerimaan retribusi daerah sudah bisa dikatakan efektif, efisien dan sudah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah?

Jawaban :

Pemungutan retribusinya harus berjalan efektif dan efisien sehingga memberikan penerimaan retribusi yang optimal.

Andri Maulidi Rijal, S.E.,  
M.M. Kepala Satuan  
Pelaksana Penyuluhan  
Unit Pusat Dana dan Informasi Pendapatan  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta